KPU
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS PEMILU DAN REPRESENTASI POLITIK

JAKARTA, 03 SEPTEMBER 2026

M. AFIFUDDIN
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

KPU
REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG

01 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan merupakan instrumen penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

02 Kualitas Pemilu tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga oleh: kualitas penyelenggaraan tahapan, integritas dan profesionalitas penyelenggara, partisipasi Masyarakat, kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara, dan lainnya.

Pemilu 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia (setelah AS & India)
yang menyelenggarakan **Pemilu paling besar & paling kompleks di dunia**

204.807.222 pemilih dalam **DPT**:
Laki-laki : 102.218.503 (49,91%)
Perempuan : 102.588.719 (50,09%)

Kontestasi **258.763 orang**, dari:
18 parpol nasional & 6 parpol lokal

Pemilihan	Jumlah Caleg
Anggota DPR	9.917 orang
Anggota DPRD Prov.	33.259 orang
Anggota DPRD Kab./Kota	214.913 orang

Pemilihan	Jumlah
Anggota DPD	668 orang
Presiden & Wakil Presiden	3 paslon

Melibatkan **7.986.206 orang** sebagai **penyelenggara Pemilu (KPU)**:

- ✓ Anggota KPU, KPU Prov & KPU Kab/Kota : 2.785 orang
- ✓ Set. KPU, KPU Prov & KPU Kab/Kota : 15.829 orang
- ✓ Badan Adhoc (PPK, PPS + PPLN & KPPS + KPPSLN) : 6.050.684 orang
- ✓ Set. Badan Adhoc + Linmas : 1.916.908 orang

Pemilihan	Dapil	Kursi
Anggota DPR	84	580
Anggota DPD	38	152
Anggota DPRD Prov	301	2.372
Anggota DPRD Kab/Kota	2.325	17.510

Lima jenis **pemilihan** secara **serentak (dalam satu hari)**:

- Presiden & Wakil Presiden
- anggota DPR
- anggota DPD
- anggota DPRD provinsi
- anggota DPRD kabupaten/kota

PENYELENGGARA KPU

2 (Dua) Kali Kebutuhan					Calon Terpilih		
Jumlah Laki-Laki	Persentase Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Persentase Perempuan	Total 2 (Dua) Kali Kebutahan	Jumlah Perempuan pada 2 (Dua) Kali Kebutuhan	Jumlah Perempuan sebagai Calon Terpilih	Persentase
4573	84%	855	16%	5428	855	435	50,88%

KPU RI

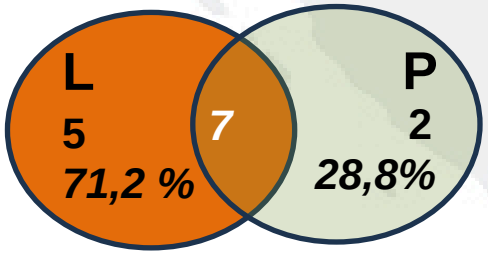

KPU PROVINSI

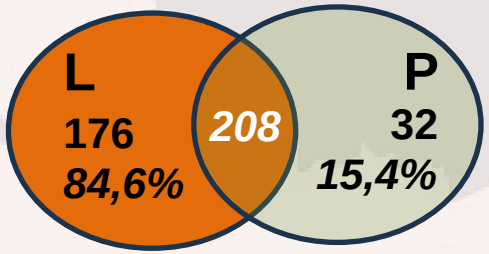

KPU KAB/KOTA

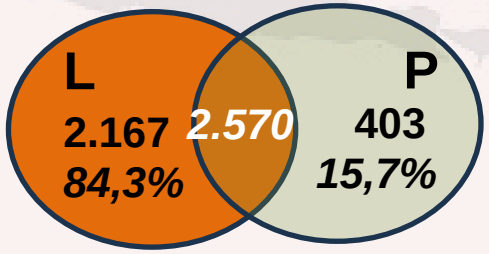

Catatan:
KPU sebagai pihak terkait dalam perkara judicial review perkara nomor 265/PUU-XXIV/2026 terhadap keterpenuhan keterwakilan Perempuan 30%.

Bahwa terlepas dari upaya Pihak Terkait untuk mengakomodir ketentuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, pada hakikatnya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah proses yang diawali dari partisipasi aktif masyarakat yang melakukan pendaftaran dan mengikuti proses dan mekanisme seleksi yang telah ditentukan dengan tidak memandang jenis kelamin tertentu, karena setiap tahapan seleksi memiliki indikator yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf h UU Pemilu, sehingga tim seleksi maupun Pihak Terkait dalam menetapkan nama-nama anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh para peserta dan tidak dapat meluluskan peserta yang memang tidak memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

KPU
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

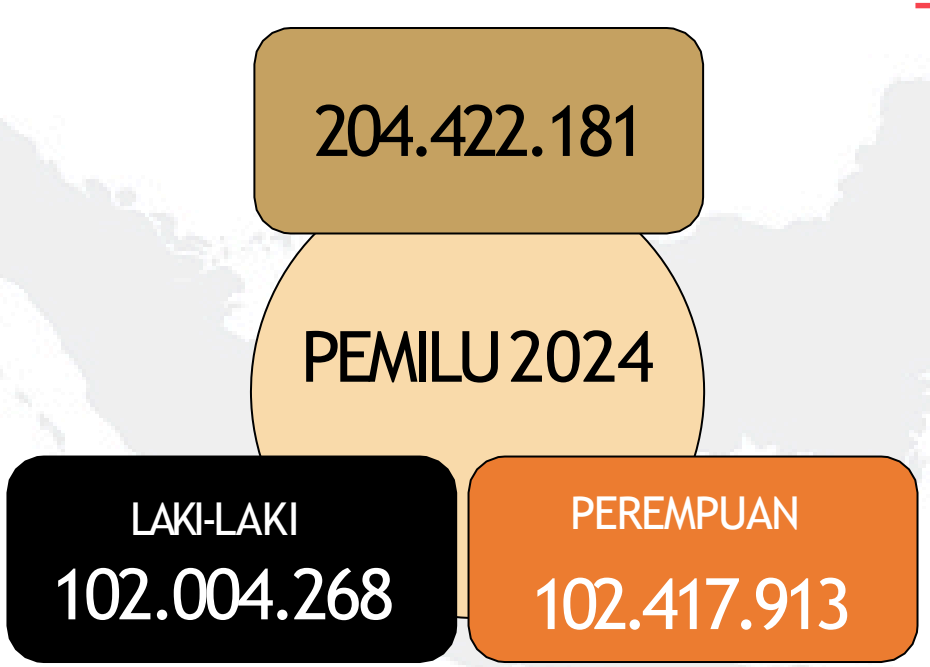

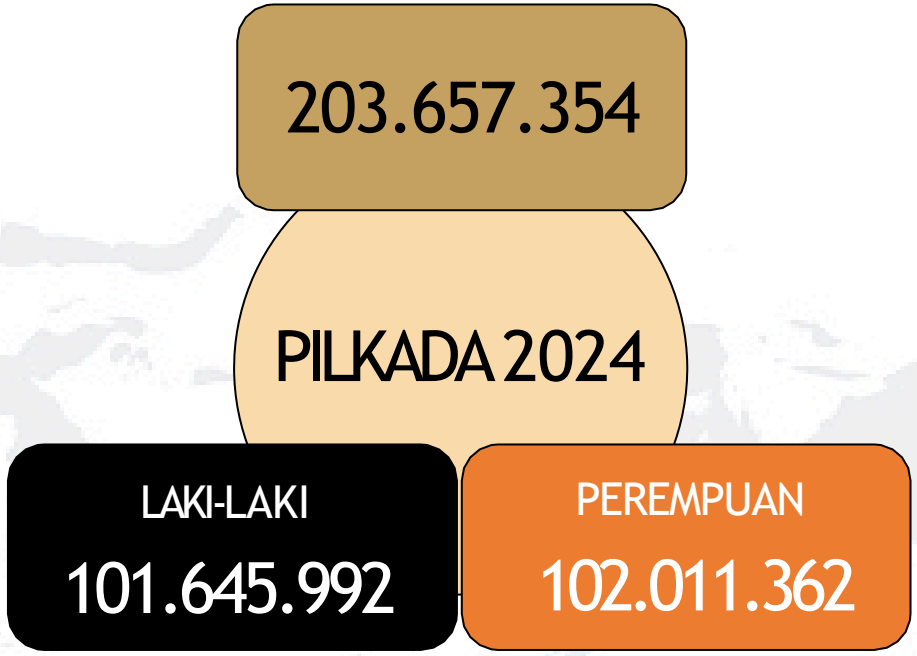

Kategori Pemilih Berdasarkan Generasi

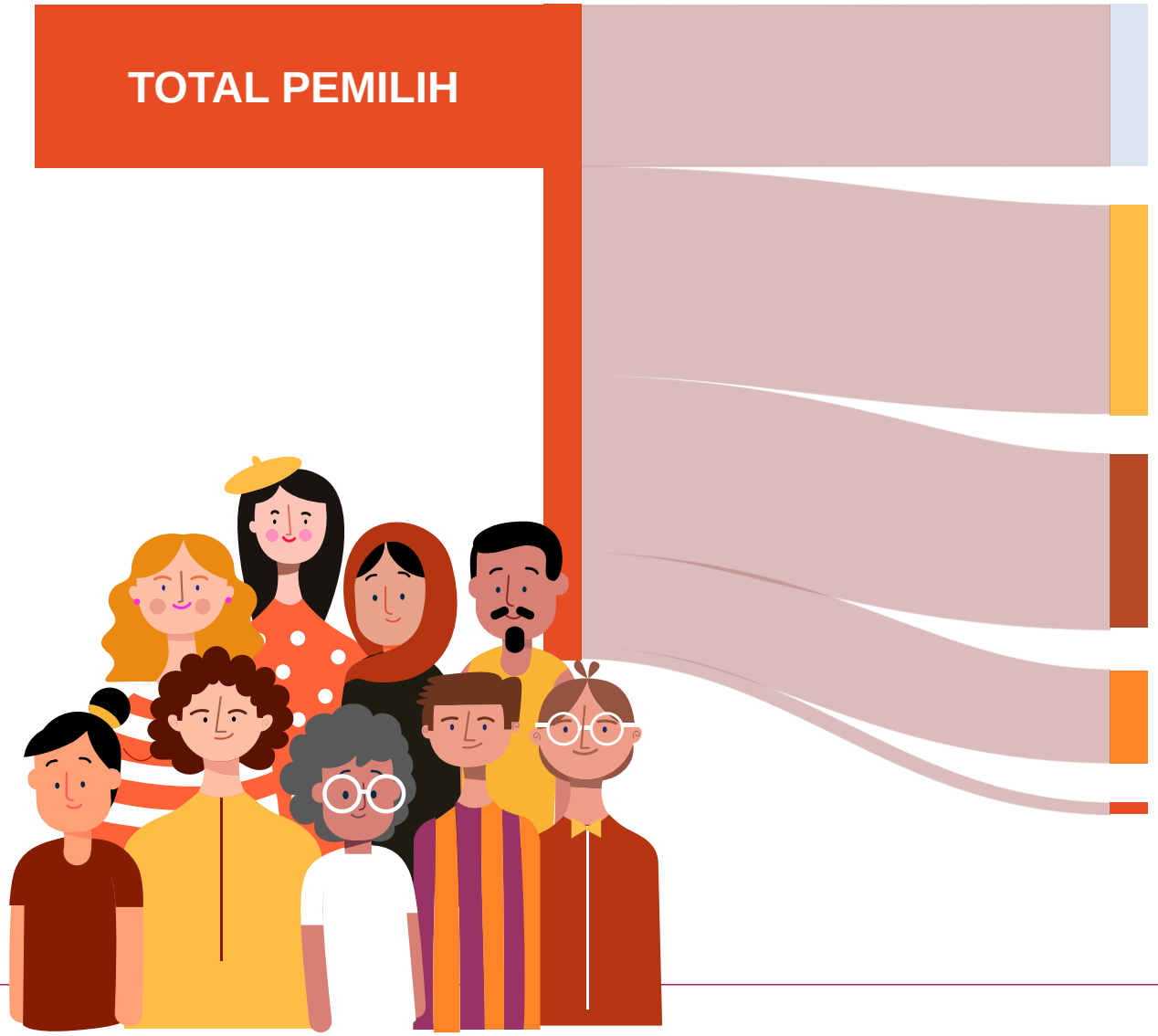

Gen Z
52.638.331 pemilih
24,56%

Milenial
68.873.953 pemilih
32,13%

Gen X
58.158.147 pemilih
27,13%

Baby Boomer
30.625.011 pemilih
14,29%

Pre-Boomer
4.059.225 pemilih
1,89%

Pemilih Disabilitas

963.050 | 0,45%

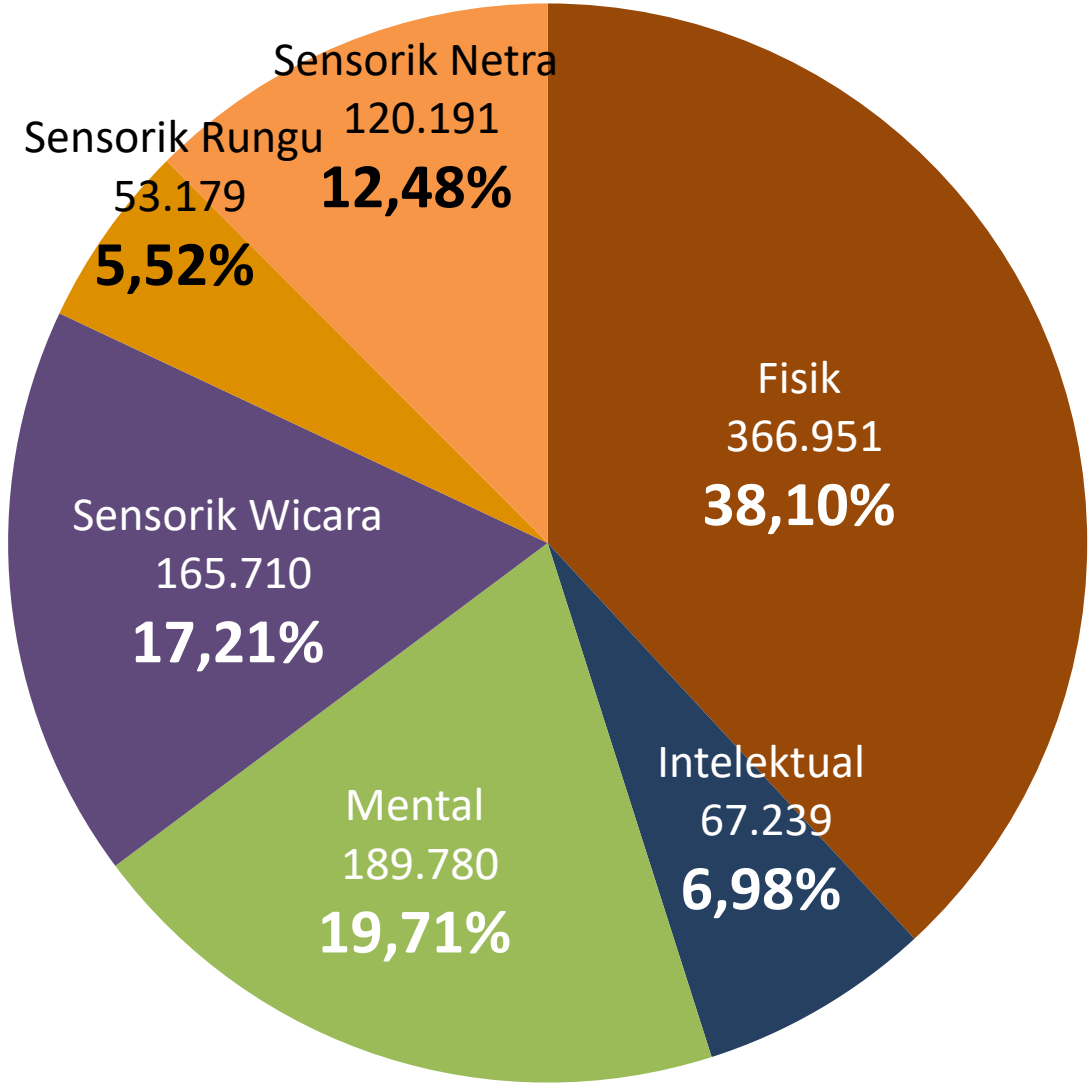

PESERTA PEMILU 2024

Daftar Calon Tetap (DCT) 2024

DPR RI
Laki-Laki: 6.241
Perempuan: 3.676
Total: 9.917

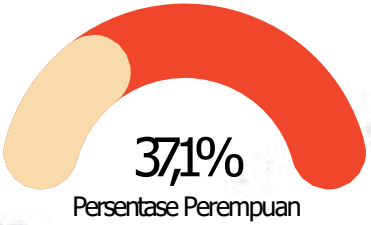

DPD
Laki-Laki: 536
Perempuan: 133
Total: 669

DPRD PROVINSI
Laki-Laki: 21.178
Perempuan: 12.081
Total: 33.259

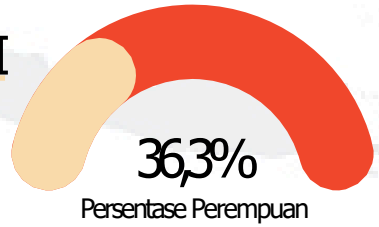

DPRD KAB/KOTA
Laki-Laki: 135.536
Perempuan: 79.377
Total: 214.913

Daftar Calon Terpilih 2024

DPR
Laki-Laki: 451
Perempuan: 129
Total: 580

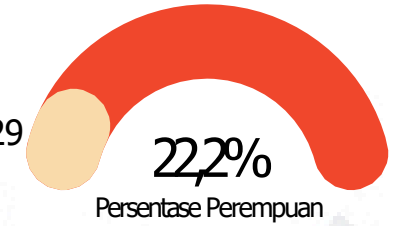

DPD
Laki-Laki: 99
Perempuan: 53
Total: 152

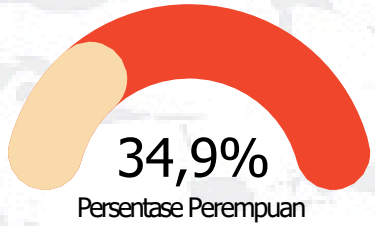

DPRD PROVINSI
Laki-Laki: 1.892
Perempuan: 445
Total: 2.337

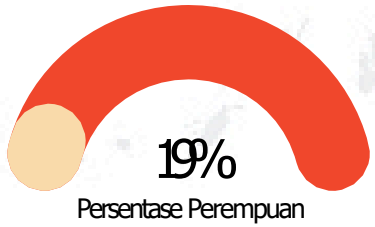

DPRD KAB/KOTA
Laki-Laki: 14.654
Perempuan: 2.864
Total: 17.428

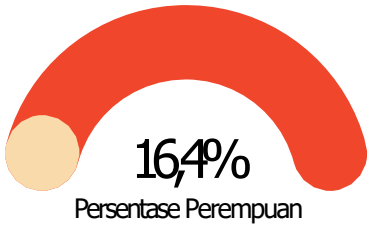

Caleg Muda dalam Pemilu 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jumlah Calon Anggota DPR Usia 21 – 30 tahun pada Pemilu 2024

Nomor Urut	Partai Politik	Jumlah Caleg Usia Muda	Jumlah Caleg	Persentase
1	PKB	59	580	10,17%
2	Partai Gerindra	93	580	16,03%
3	PDI Perjuangan	42	580	7,24%
4	Partai Golkar	26	580	4,48%
5	Partai Nasdem	52	580	8,97%
6	Partai Buruh	105	580	18,10%
7	Partai Gelora	42	396	10,61%
8	PKS	43	580	7,41%
9	PKN	129	525	24,57%
10	Partai Hanura	60	485	12,37%
11	Partai Garuda	309	570	54,21%
12	PAN	61	580	10,52%
13	PBB	65	470	13,83%
14	Partai Demokrat	45	580	7,76%
15	PSI	157	580	27,07%
16	Partai Perindo	90	579	15,54%
17	PPP	58	580	10,00%
24	Partai Ummat	37	512	7,23%
Jumlah		**1.473**	**9.917**	**14,85%**

Sumber: data diolah dari detiknews.com dan BPS

Pada Pemilu 2024, sekitar **1.473 orang (14,85%) anak muda** yang ikut dalam kontestasi elektoral sebagai **caleg anggota DPR RI**.

Lalu, dari 580 orang **anggota DPR RI terpilih** hanya **21 orang** yang **berusia di bawah 30 tahun** & **74 orang** yang berusia **30 – 40 tahun**. Kalau dijumlah **hanya 85 orang** atau sekitar **16,38%** wakil rakyat berusia 21 – 40 tahun.

Jumlah Anggota Terpilih DPR RI pada Pemilu 2024 Berdasarkan Kelompok Umur

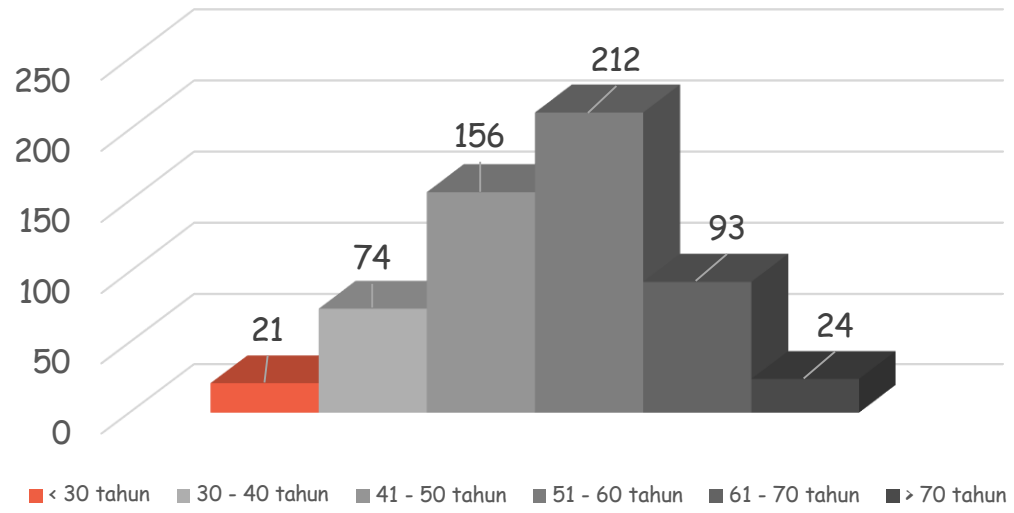

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PESERTA PEMILU 2024

Rekap Calon Penyandang Disabilitas DCT DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

No	Jenis Pemilihan	Disabilitas Sensorik Netra			Disabilitas Fisik			Disabilitas Intelektual			Disabilitas Sensorik Rungu			Disabilitas Mental			Disabilitas Sensorik Wicara			Total Penyandan Disabilitas Calon
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	DPR RI	1	0	1	7	1	8	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	10
2	DPRD PROVINSI	3	0	3	21	9	30	2	1	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1	39
3	DPRD KABUPATEN/KOTA	13	5	18	157	45	202	13	2	15	4	1	5	16	2	18	0	1	1	259
TOTAL		**17**	**5**	**22**	**185**	**55**	**240**	**15**	**3**	**18**	**5**	**1**	**6**	**18**	**2**	**20**	**1**	**1**	**2**	**308**

KPU
REPUBLIK INDONESIA

PESERTA PILKADA 2024

Calon Gubernur
Laki-Laki: 96
Perempuan: 7
Total: 103

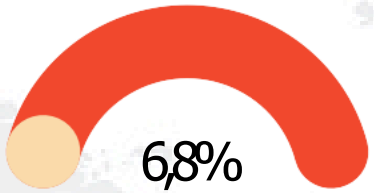

Persentase Perempuan

Calon Wakil Gubernur
Laki-Laki: 96
Perempuan: 7
Total: 103

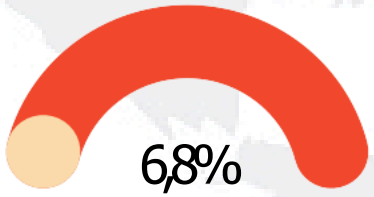

Persentase Perempuan

Calon Bupati
Laki-Laki: 1.056
Perempuan: 113
Total: 1.169

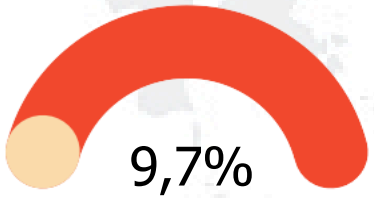

Persentase Perempuan

Calon Wakil Bupati
Laki-Laki: 1.057
Perempuan: 112
Total: 1.169

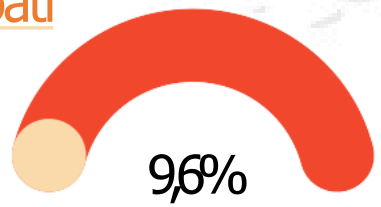

Persentase Perempuan

Walikota
Laki-Laki: 249
Perempuan: 35
Total: 284

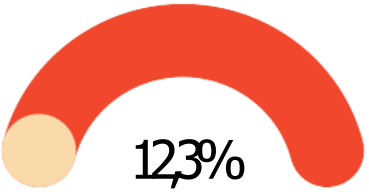

Persentase Perempuan

Wakil Walikota
Laki-Laki: 250
Perempuan: 34
Total: 284

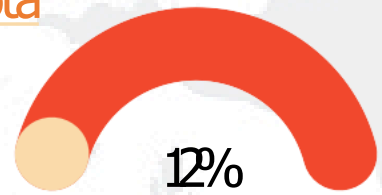

Persentase Perempuan

Hasil Pemilu 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Pemilu Presiden & Wakil Presiden

40.971.906
Suara Sah

96.214.691
Suara Sah

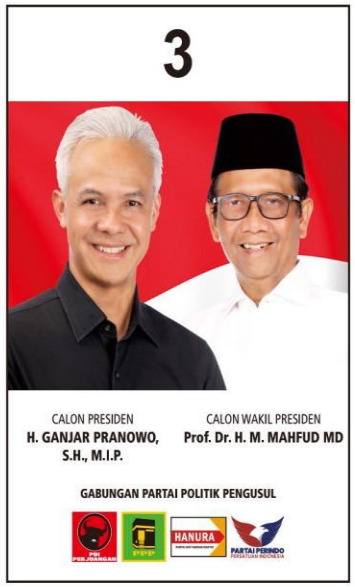

27.040.878
Suara Sah

Perolehan Suara Sah Nasional:
164.227.475 Suara Sah

Sumber:
Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 & perubahannya serta
Keputusan KPU Nomor 1205 Tahun 2024

Pemilu Anggota DPR

Nomor Urut	Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Jumlah Kursi
1	PKB	16.115.358	68
2	Partai Gerindra	20.071.345	86
3	PDI Perjuangan	25.384.673	110
4	Partai Golkar	23.208.488	102
5	Partai Nasdem	14.660.328	69
6	Partai Buruh	972.898	0
7	Partai Gelora	1.282.000	0
8	PKS	12.781.241	53
9	PKN	326.803	0
10	Partai Hanura	1.094.599	0
11	Partai Garuda	406.884	0
12	PAN	10.984.639	48
13	PBB	484.487	0
14	Partai Demokrat	11.283.053	44
15	PSI	4.260.108	0
16	Partai Perindo	1.955.131	0
17	PPP	5.878.708	0
24	Partai Ummat	642.550	0
Jumlah		**151.793.293**	**580**

Suara Sah dan Tidak Sah
DPR RI

SUARA SAH

151.793.293

SUARA TIDAK SAH

15.883.845

JUMLAH

167.677.138

9,47%
SUARA TIDAK SAH

suara tidak sah dalam Pemilu Legislatif bersinggungan dengan isu penataan dapil nasional

PARTISIPASI PEMILIH PEMILU DAN PILKADA 2024

Presiden & Wakil Presiden

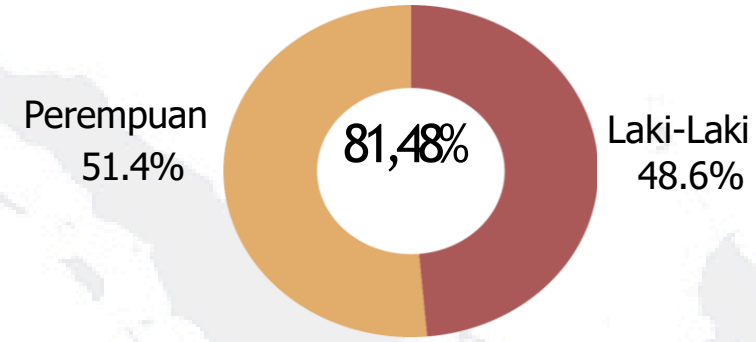

DPR

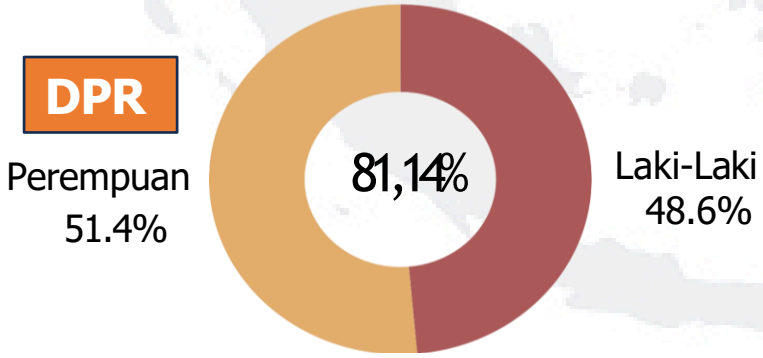

DPD

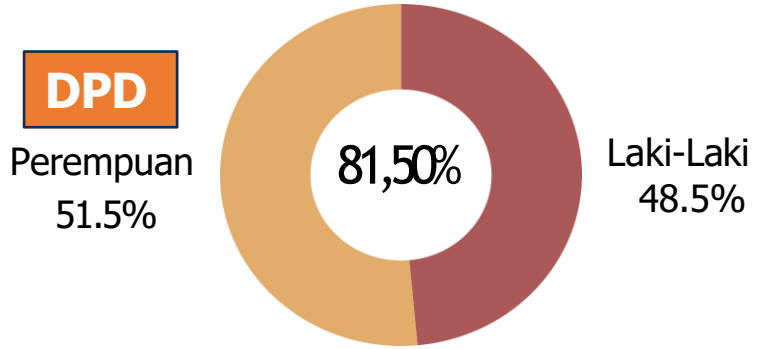

Gubernur & Wakil Gubernur

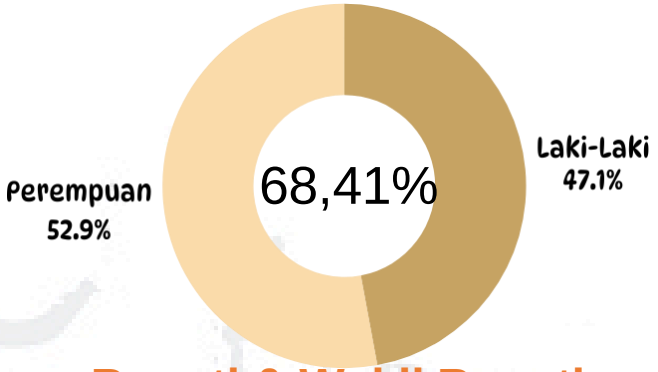

Bupati & Wakil Bupati

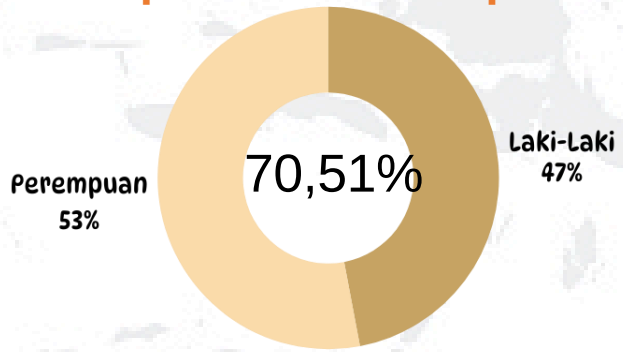

Walikota & Wakil Walikota

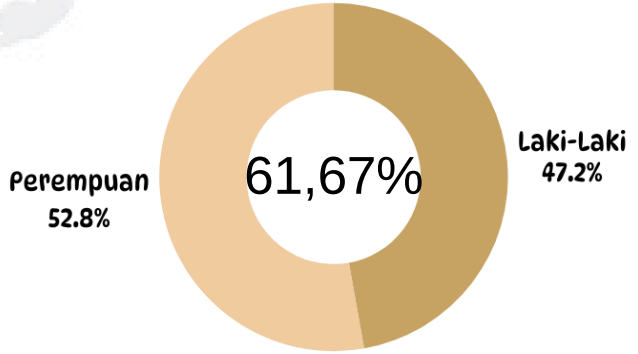

Evaluasi Pemilu 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Dimensi Eksternal

- **Putusan lembaga peradilan**
  Putusan beberapa lembaga (seperti MK, MA & PTUN) yang terbit di tengah tahapan berimplikasi pada penyesuaian PKPU dan kebijakan yang ada.
- **Faktor sosial & politik**
  Ketegangan antarpeserta Pemilu (antarparpol atau antarkandidat) berpotensi menciptakan konflik yang dapat memengaruhi suasana demokrasi.

Dimensi Tahapan

- **Daftar Pemilih**, antara lain:
  Masih ada DP4 yang tidak akurat yang menyebabkan kerancuan dalam DPT
- **Pencalonan**, antara lain:
  Kesulitan parpol memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam DCT
- **Kampanye**, antara lain:
  Keterlambatan penyerahan desain APK dari Peserta Pemilu sehingga fasilitasi APK juga terlambat
- **Dana Kampanye**, antara lain:
  Masih terdapat Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK & LPPKD, masih terdapat sumbangan dana kampanye melebihi batas & berasal dari pihak yang dilarang
- **Pemungutan & penghitungan suara**, antara lain:
  Pemberian surat suara kepada pemilih yang tidak terdaftar, aplikasi Sirekap (kendala teknis, kesulitan akses & unggah data di beberapa daerah), terjadi PSU, PSS & PSL di beberapa TPS.
- **Rekapitulasi penghitungan suara**, antara lain:
  Keterlambatan rekapitulasi di beberapa daerah (gangguan keamanan, bencana alam, banyaknya TPS di satu wilayah, perbedaan data antara formulir C dan D)

Dimensi Kelembagaan

- **Kapasitas SDM**
  - ✓ Beban kerja berlebih di kabupaten/kota.
  - ✓ Kurangnya kapasitas staf dalam operasional sistem teknologi.
- **Manajemen Logistik**
  Kurang optimalnya proses monitoring & distribusi di percetakan hingga pelaksanaan sortir lipat di gudang satker sebelum distribusi ke TPS.

Dimensi Nontahapan

- **Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat**
  - ✓ Sosdiklih di daerah 3T belum terlaksana dengan baik.
  - ✓ Sosdiklih untuk kelompok rentan (penyandang disabilitas, masyarakat adat, dll) masih terbatas.
- **Pemangku kepentingan Pemilu**
  - ✓ Banyaknya lembaga negara yang terlibat dalam proses Pemilu yang terkadang menerbitkan aturan yang tidak sinkron.

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Tantangan Meningkatkan Kualitas Pemilu

Beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama:

1. Politik uang
2. Penyebaran hoax dan disinformasi.
3. Politisasi SARA.
4. Rendahnya literasi politik bagi Masyarakat.
5. Apatisme dan menurunnya kepercayaan publik.
6. Ketimpangan akses terhadap informasi.
7. Keterwakilan kelompok Masyarakat tertentu yang masih perlu diperkuat.

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Representasi Politik

Representasi politik merupakan mekanisme untuk memastikan aspirasi Masyarakat dapat terwakili dalam proses pengambilan Keputusan publik dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, keterwakilan kelompok Masyarakat, kesetaraan kesempatan politik, kompetensi dan integritas wakil rakyat, responsivitas terhadap kebutuhan Masyarakat, dan akuntabilitas kepada konstituen.

Memperkuat Keterwakilan Kelompok Masyarakat

Kualitas representasi dapat ditingkatkan dengan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi: Perempuan, pemilih muda, penyandang disabilitas, kelompok Masyarakat terpencil, kelompok rentan dan marjinal, dan Masyarakat dengan kebutuhan khusus.

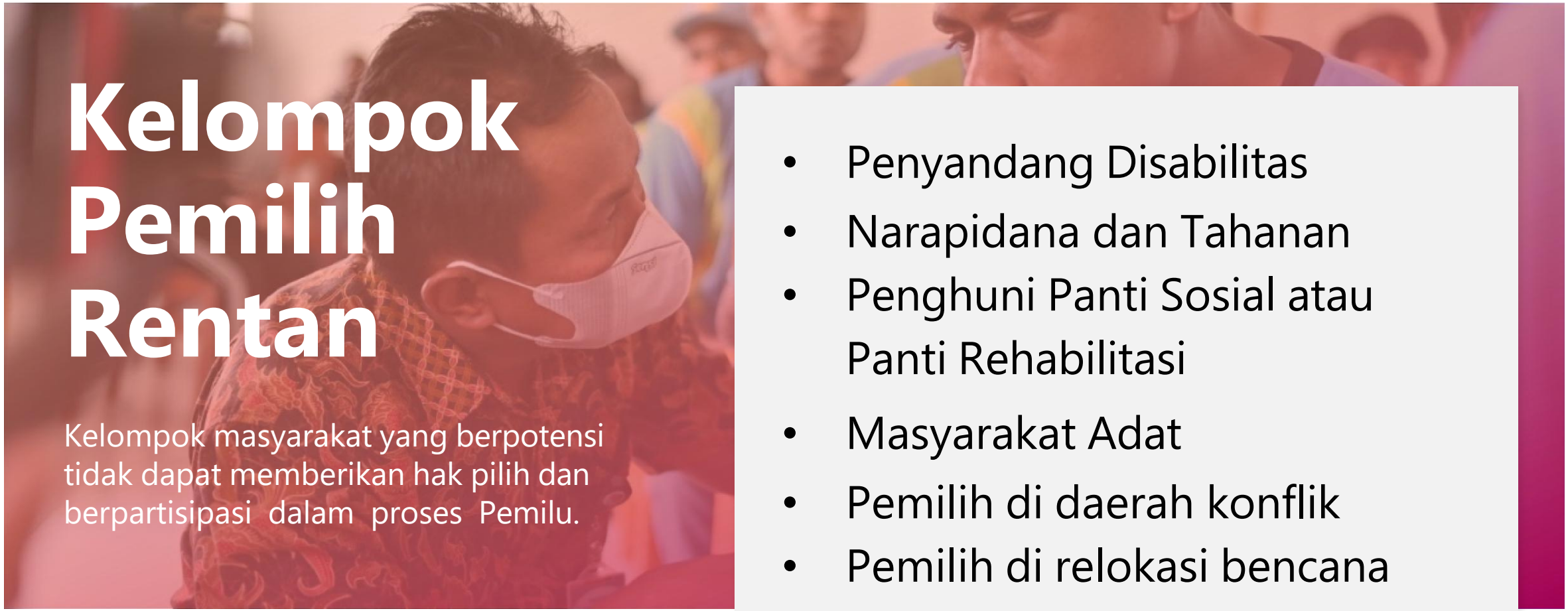

Kelompok Pemilih Rentan

Kelompok masyarakat yang berpotensi tidak dapat memberikan hak pilih dan berpartisipasi dalam proses Pemilu.

- Penyandang Disabilitas
- Narapidana dan Tahanan
- Penghuni Panti Sosial atau Panti Rehabilitasi
- Masyarakat Adat
- Pemilih di daerah konflik
- Pemilih di relokasi bencana alam

Program/Kegiatan Kolaborasi KPU Bersama Kelompok Pemilih Rentan

Pengembangan, Pengelolaan dan Peningkatan pelayanan website KPU;

Pengembangan, dan Pengelolaan JDIH KPU yang ramah difabel (walaupun *belum mencakup seluruh kategori disabilitas*);

Mengikutsertakan organisasi disabilitas dalam penyusunan Peraturan KPU dan kegiatan lainnya;

Sosialisasi Pemilu bersama organisasi disabilitas (PPDI, PPUA Penca), organisasi Perempuan, organisasi Masyarakat adat dan sosialisasi di rumah tahanan/lembaga permasyarakatan.

PENINGKATAN KETERPILIHAN PEREMPUAN DI DPR

KPU
REPUBLIK INDONESIA

JUMLAH KETERPILIHAN PEREMPUAN DI DPR

PARTAI POLITIK	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
PKB	7	10	12	15
Partai Gerindra	5	11	14	20
PDIP	18	21	26	26
Partai Golkar	19	16	19	22
Partai NasDem	-	4	19	19
PKS	3	1	8	9
PPP	5	10	5	-
PAN	7	9	7	8
Partai Demokrat	36	13	10	10
Hanura	4	2	-	-
JUMLAH	**104**	**97**	**120**	**129**

PENINGKATAN KETERPILIHAN PEREMPUAN DI DPD

KPU
REPUBLIK INDONESIA

KERJASAMA KPU DALAM MEMBANGUN REPRESENTASI POLITIK

NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN KELOMPOK DISABILITAS

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA 29/08/2023 – 29/08/2028	Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara di seluruh wilayah indonesia
PUSAT PEMILIHAN UMUM AKSES DISABILITAS 24/10/2023 – 24/10/2028	Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara republik indonesia
KOMISI NASIONAL DISABILITAS 24/10/2023 – 24/10/2028	Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERGURUAN TINGGI

Komisi Pemilihan Umum bersama dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia bekerja sama melalui Nota Kesepahaman dalam rangka:

Pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dibidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi

Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagai perwujudan kesetaraan hak politik setiap warga negara republik indonesia

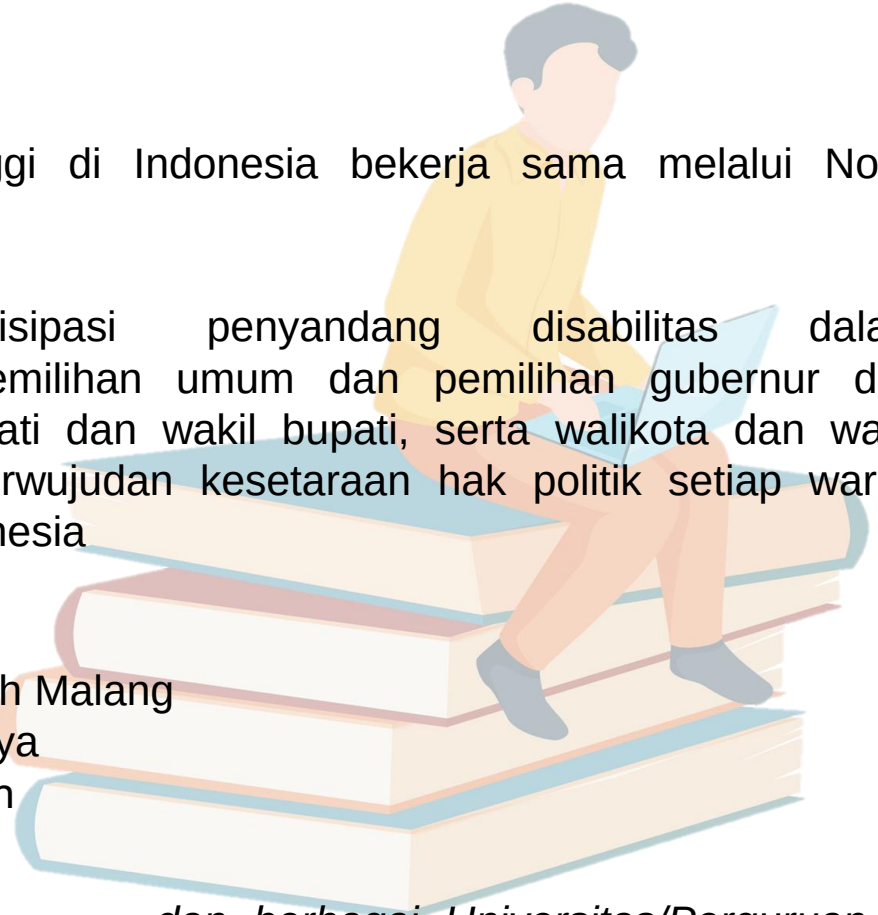

Perguruan Tinggi yang telah melakukan Nota Kesepahaman, diantaranya:

- Universitas Indonesia
- Universitas Bengkulu
- Universitas Sebelas Maret
- UIN SYARIF HIDAYATULLAH
- Universitas Yudharta Pasuruan
- Universitas Nurul Jadid
- Universitas Islam Malang
- Universitas Muhammadiyah Malang
- Universitas Negeri Surabaya
- Universitas Sains Al Qur'an
- Institut Pertanian Bogor
- Universitas Bhayangkara
- Universitas Sumatera Utara
- Universitas Halu Oleo

dan berbagai Universitas/Perguruan Tinggi lainnya di Indonesia

NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DENGAN MASYARAKAT ADAT

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan pemenuhan hak pilih bagi masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2024

RUANG LINGKUP

a. penyedian sumber daya dalam rangka sosialisasi dan Pendidikan Pemilih serta penyebaran informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Masyarakat Adat;
b. pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kepada Masyarakat Adat;
c. mendorong mekanisme kebijakan afirmative actions bagi Masyarakat Adat agar dapat berpartisipasi penuh dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
d. pendataan pemilih khusus bagi Masyarakat Adat dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

KPU
REPUBLIK INDONESIA

Tantangan Representasi Politik dalam Pemilu

Tantangan representasi politik dalam Pemilu:

1. Ketimpangan keterwakilan. Dalam hal ini tidak semua kelompok Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terwakili seperti Perempuan, kaum muda, Masyarakat adat, dan kelompok minoritas.
2. Politik uang. Dalam hal ini pemilih dapat dipengaruhi oleh pemberian uang atau barang sehingga pilihan politik tidak sepenuhnya berdasarkan program dan kualitas kandidat.
3. Disinformasi dan kampanye negative. Dalam hal ini berita palsu dan informasi yang menyesatkan dapat mempengaruhi pilihan pemilih.

REKAPITULASI

DPB Semester I 2026

TOTAL PEMILIH

NASIONAL

214.354.667

1,17%

DPB S2 2025
211.865.861

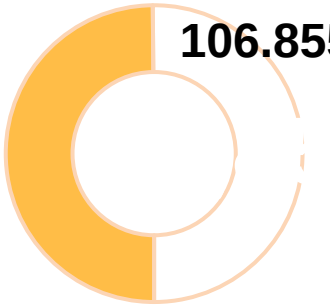

106.855.020

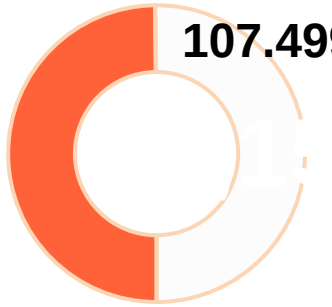

107.499.647

DALAM NEGERI

212.406.069

Prov	Kab/Kota	PPLN
38	514	131

Kecamatan	Desa/Kelurahan
7.285	83.737

LUAR NEGERI

1.948.598

Arah Kebijakan & Strategi Pemilu 2029

PILAR 01

Tata Kelola & Pelayanan

Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029, KPU berikhtiar meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan terhadap pemilih dan peserta pemilu demi terciptanya pemilu yang demokratis dan inklusif.

Fokus: Demokratis & Inklusif

PILAR 02

Reformasi Regulasi

Perubahan Undang-Undang Pemilu diharapkan mampu mengakomodir dan berorientasi pada upaya perbaikan tata kelola pemilu yang transparan, aksesibel, akuntabel, inklusif, dan menjaga nilai-nilai konstitusional.

Fokus: Transparansi & Akuntabilitas

PILAR 03

Pemilu Ramah & Inklusif

KPU terus berupaya menciptakan Pemilu yang ramah terhadap kelompok rentan demi terwujudnya representasi politik yang lebih baik.

Fokus: Kesetaraan Hak Pilih

KPU
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA
14/2 2024